

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN KAWASAN HUTAN DI KPHL RINJANI TIMUR (*Studi Kasus Desa Dara Kunci dan Desa Sugian Kecamatan Sambelia*)

**ANALYSIS COMMUNITY PERCEPTION OF FOREST AREAS IN KPHL RINJANI TIMUR
(Case Study of Dara Kunci Village and Village Sugian Sambelia District)**

Arif Wahyu Fajri, Sitti Latifah, Rato Firdaus Silamon

Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram Jln. Majapahit No 62, Mataram, NTB

E-mail : new.aurademon@gmail.com

Abstract

The perception on the existence of forest area in KPHL Rinjani Timur, in this case is the community around forest needs to be researched in order to know the mindset and view of society. This study aims to determine the community perception of the function of forest area, dependence and interaction with forest area, forest encroachment practices and know factors that encourage the occurrence of forest encroachment. This research was conducted in February 2017 conducted in Dara Key Village and Sugian Village, Sambelia District, East Lombok Regency, NTB. The method used is survey and descriptive method to 49 respondents taken using stratified random sampling, the type of data used is qualitative data by using primary and secondary data sources. Based on the research results it is known that the community around the forest area has not received the benefits of forest functions directly, the community has a dependence on the forest area is high enough but does not change the influence of the pattern of piker society to convert the forest area as plantation land and agriculture and residence, as a public area where anyone can enter, not allow to own individually. Social jealousy is considered to be a factor driving forest encroachment, especially in the granting of forest area management permits. The lack of skills, low level of education and lack of socialization from the government and the dependence on high forest area are the main factors in the encroachment of the area.

Keywords: Community, Perception and Encroachment

Persepsi terhadap keberadaan kawasan hutan di KPHL Rinjani Timur, dalam hal ini adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap fungsi kawasan hutan, ketergantungan dan interaksi dengan kawasan hutan, praktek perambahan hutan serta mengetahui faktor faktor yang mendorong terjadinya perambahan hutan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 di laksanakan di Desa Dara Kunci dan Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Metode yang digunakan yaitu metode survey dan deskriptif terhadap 49 responden yang diambil menggunakan stratified random sampling, jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat disekitar kawasan hutan belum menikmati manfaat dari fungsi hutan secara langsung, masyarakat memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan yang cukup tinggi namun tidak mengubah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk mengkonversi kawasan hutan sebagai lahan perkebunan dan pertanian maupun tempat tinggal, masyarakat menganggap kawasan hutan sebagai area public dimana siapapun bias untuk memasukinya namun tidak untuk dimiliki secara perorangan. Kecemburuan sosial dianggap menjadi faktor pendorong terjadinya perambahan hutan khususnya dalam pemberian izin pengelolaan kawasan hutan. Minimnya keterampilan, tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya

sosialisasi dari pemerintah dan ketergantungan terhadap kawasan hutan yang cukup tinggi menjadi faktor utama perambahan mahi terjadi pada kawasan tersebut.

Kata kunci : Masyarakat, Persepsi dan Perambahan

PENDAHULUAN

Kerusakan hutan (deforestasi) masih merupakan ancaman bagi Indonesia. Menurut data laju deforestasi periode 2003-2006 yang di keluarkan oleh Departemen Kehutanan laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar pertahun. Namun menurut data yang dikeluarkan *The UN Food & Agriculture Organization (FAO)*, angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 mencapai 1,8 juta hektar/tahun. Laju deforestasi hutan di Indonsia mendapat sumbangan terbesar dari kegiatan industri, terutama industri kayu yang menyalahgunakan perijinan sehingga mengarah pada pembalakan liar. Penyebab deforestasi kedua disebabkan oleh alih fungsi lahan (konversi hutan) menjadi perkebunan, yang telah merusak lebih dari 7 juta ha hutan sampai akhir 1997 (Alamanda.org,2014).

Menurut data dari KPHL Rinjani Timur, dari 1.071.722,83 luas kawasan hutan NTB, 37.589 ha berada di Kabupaten Lombok Timur. Sambelia merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Jarak antar kawasan hutan dan permukiman penduduk memungkinkan terjadinya banyak kegiatan yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan perambahan pada kawasan hutan salah satunya yakni Desa Dara Kunci dan Desa Sugian yang merupakan satu dari sebelas desa yang berada di kecamatan Sambelia,Desa Dara Kunci merupakan pemekaran dari Desa Belanting (Profil KPHL Rinjani Timur,2014)

Kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan Desa Dara Kunci dan Desa Sugian keberadaanya sangat rentan, dikarenakan jarak permukiman warga yang dekat yaitu berkisar antara 1 – 2 km dengan kawasan hutan dan masyarakat masih menggantungkan penghasilannya dari hasil hutan.Selain itu masih kurangnya pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap kawasan hutan mengakibatkan semakin maraknya penebangan liar dan alih fungsi lahan hutan,kerusakan hutan yang terjadi di areal Kawasan Hutan Sambelia yang terus meluas dikhawatirkan daerah ini akan terjadi bencana alam berupa banjir bandang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Bencana banjir bandang di Kecamatan Sambelia seringkali terjadi. Dinas PU mencatat, banjir bandang di Kecamatan Sambelia telah terjadi pada tahun1957, 2006, 2012 dan2014. Kerusakan infrastuktur jalan dan jembatan akibat banjir bandang terakhir pada tahun 2014 mencapai Rp 2 miliar (Dinas Pekerjaan Umum NTB, 2014).

Dikarenakan ketergantungan masyarakat pada sekitar kawasan hutan yang sangat tinggi dan kerusakan hutan mencapai lebih dari 200 Ha, dimana sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang sejauh mana pemahaman dan persepsi masyarakat berpengaruh terhadap perambahan hutan serta faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan yang terjadi di Desa Dara Kunci dan Desa Sugian, Kecamatan Sambelia yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan

Mengetahui persepsi masyarakat terhadap fungsi kawasan hutan, ketergantungan dan interaksi dengan kawasan hutan serta praktek perambahan hutan kemudian bagaimana mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perambahan huta.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang analisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan hutan di KPHL Rinjani Timur (*studi kasus Desa Dara Kunci dan Desa Sugian Kecamatan Sambelia*) dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Bertempat di Desa Dara Kunci dan Desa Sugian Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan deskriptif. Metode survey adalah cara melakukan pengamatan di tandai dengan pengambilan sampel dari suatu lokasi (Nazir, 2009) dan metode deskriptif yaitu metode pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data menganalis, menjelaskan dan menarik kesimpulan

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar dikawasa yakni masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan HKm yang berjumlah 437 orang dan yang tidak tergabung dalam keanggotaan HKm dengan jumlah 2.072 orang yang kemudian diambil sampel menggunakan rumus *slovin* (Sevilla, 1994). Kemudian dari perhitungan ukuran sample dengan menggunakan rumus *Slovin* dan dipilih tingkat kesalahan (e) sebesar 20% maka responden yang didapat sejumlah 24 orang petani HKm dan 25 orang responden yang tidak tergabung dalam kelompok petani HKm.

HASIL dan PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Dara Kunci dan Desa Sugian tepatnya di Dusun Menang Rea, Sandongan, Koko Pede dan Dasan Baru Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Sambelia memiliki ketinggian antara 0 hingga 930 meter diatas permukaan air laut. Desa Dara Kunci berjarak 8 km dari Ibu Kota Kecamatan dan 58 km dari Ibu Kota Kabupaten, sementara jarak tempuh Desa Sugian menuju ibu kota kecamatan 4 km dan pusat ibu kota kabupaten mencapai 54 km. Desa Dara Kunci merupakan desa pemekaran dari Desa Belanting dengan luasan daerah mencapai 3,54 km² atau sekitar 1,43% dari luasan Kecamatan Sambelia. Sedangkan Desa Sugian memiliki luasan sekitar 35,6 km² atau sekitar 14,30% dari luasan kecamatan sambelia, kedua desa tersebut merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan yakni Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK1)

4.3 Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi Hutan

Dalam undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dibagimenjadi tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi perlindungan, fungsi produksi. Hutan lindung adalah hutan yang diperuntukan bagi perlindungan tata tanah dan air bagi kawasan di sekitarnya. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang dipergunakan sebagai perlindungan alam, pengawetan jenis flora dan fauna wisata alam dan keperluan ilmu pengetahuan. Hutan produksi adalah hutan yang diperuntukkan bagi produksi kayu dan hasil hutan lainnya untuk mendukung perekonomian negara dan perekonomian masyarakat. Walaupun hutan mempunyai fungsi perlindungan, fungsi konservasi dan fungsi produksi, namun fungsi utama hutan tidak akan berubah, yakni untuk menyelenggarakan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida, serta mempertahankan kesuburan tanah, keseimbangan tata air wilayah dan kelestarian daerah dari erosi (Arief, 2001).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait perepsi masyrakat tentang fungsi hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi Hutan

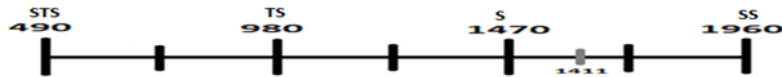
| No | Jawaban Respondem | Bobot | Frekuensi | Presentase | Hasil |
|----|---------------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1 | Sangat setuju | 4 | 99 | 20,2 | 396 |
| 2 | Setuju | 3 | 244 | 49,8 | 732 |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 136 | 27,7 | 272 |
| 4 | Sangat tidak setuju | 1 | 11 | 2,2 | 11 |
| | | | 490 | 100 | 1411 |

Sumber : Data Primer, diolah (2018)

Kategori sangat setuju maksudnya masyarakat mengetahui fungsi hutan dan merasa menerima manfaat hutan secara optimal baik secara langsung maupun tidak langsung dari keberadaan kawasan hutan. Kategori setuju maksudnya masyarakat mengetahui fungsi hutan namun tidak bisa menerima manfaat hutan secara optimal dari keberadaan kawasan hutan tersebut. Tidak setuju maksudnya masyarakat mngetahui fungsi hutan tetapi tidak merasa menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari keberadaanya. Sedangkan kategori sangat tidak setuju maksudnya

masyarakat tidak mengetahui fungsi hutan dan tidak merasa menerima manfaat dari keberadaan kawasan hutan tersebut.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai data pada tabel 4.8, maka data dimasukkan kedalam diagram garis kontinum.



Gambar 4.1. Garis kontinum persepsi masyarakat tentang fungsi hutan

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju

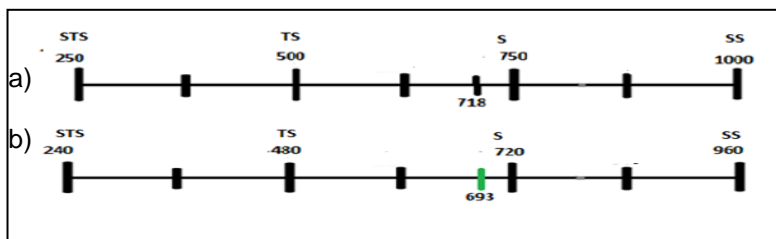
TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Berdasarkan garis kontinum diatas, tingkat persepsi responden (1411) berada di antara batas persepsi sangat setuju (1715) dan skala setuju (1470), tetapi dalam kecenderungan berada di skala setuju. Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat mengetahui fungsi hutan tetapi masih belum menikmati manfaat dari fungsi hutan secara langsung dan optimal, masyarakat hanya memperoleh manfaat secara tidak langsung dari hutan seperti manfaat sebagai resapa air, ketersediaan kualitas air, tempat tinggal beragam jenis satwa, sarana edukasi dan mencegah bencana alam seperti banjir.

Selanjutnya persepsi responden dibagi lagi berdasarkan keterikatan responden terhadap kawasan hutan yakni responden yang merupakan anggota dari kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan responden yang tidak tergabung dalam kelompok Hutan Kemasyaraktan (HKm). Untuk tingkat persepsi responden terhadap persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan, dapat dilihat dalam diagram-diagram garis kontinum berikut ini.



Gambar diagram garis kontinum persepsi masyarakat terhadap fungsi hutan berdasarkan keikutsertaan dalam kelompok HKm dan non HKm

Keterangan:

Gambar a : Responden yang merupakan Anggota HKm

Gambar b : Responden yang tidak termasuk dalam keanggotaan HKm

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Berdasarkan diagram garis kontinum diatas, tidak terlihat perbedaan yang terlalu besar antara petani HKm dan bukan petani HKm terkait dengan fungsi hutan. Hal ini dikarenakan kondisi pengetahuan masyarakat yang tidak terlalu jauh terhadap persepsi terhadap fungsi hutan.

4.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perambahan Hutan

Perambahan kawasan hutan lebih disebabkan kurangnya lahan usaha masyarakat sekitar hutan. Okupasi lebih dilakukankarena kepentingan individu yang diakibatketerdesakan kesempitan usaha. Termasuk dalam kategori ini masyarakat yang

masih mempraktekan pola perladangan berpindah. Masyarakat umumnya mengetahui bahwa yang mereka okupasi atau dirambah adalah kawasan hutan negara yang serta merta dapat mereka miliki (Djajono,2009).

Hasil pengolahan data terkait perepsi masyarakat terhadap perambahan hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

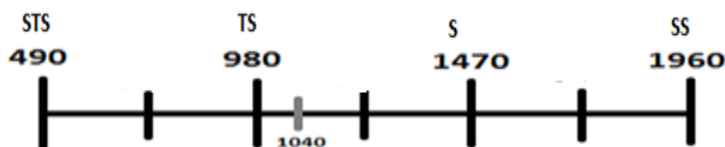
Tabel persepsi masyarakat terhadap peraktek perambahan hutan

| No | Jawaban respondem | Bobot | Frekuensi | Presentase | Hasil |
|----|---------------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1 | Sangat setuju | 4 | 2 | 0,41 | 8 |
| 2 | Setuju | 3 | 115 | 23,5 | 345 |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 314 | 64,1 | 628 |
| 4 | Sangat tidak setuju | 1 | 59 | 12,04 | 59 |
| | | | 490 | 100 | 1040 |

Sumber : Data Primer, diolah (2018)

Kategori sangat setuju maksudnya masyarakat menganggap kawasan hutan yang bersifat *public goods* yang *open acces* dimana lahan dan hasil hutan dapat dimiliki, dipindah tangankan dapat dipungut serta dapat dimanfaatkan dan dimiliki. Kategori setuju maksudnya masyarakat menganggap kawasan hutan sebagai *public goods* dengan acces terbatas dimana lahan dan hasil hutan dapat dipindah tangankan dapat dipungut dan dimanfaatkan serta dapat dimasuki secara keruangan akan tetapi tidak dapat dimiliki sebagi tanah hak. Kategori tidak setuju maksudnya masyarakat menganggap kawasan hutan sebagi *public goods* dengan acces terbatas dimana lahan dan hasil hutan hanya dapat dimasuki secara keruangan serta hanya dapat dipungut dan dimanfaatkan. Kategori sangat tidak setuju maksudnya, masyarakat menganggap kawasan hutan bukan sebagi *public goods* dan tidak *open acces*.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai data pada tabel 4.9, maka data dimasukan kedalam diagram garis kontinum.



Gambar garis kontinum Persepsi masyarakat terhadap peraktek perambahan hutan

Keterangan :

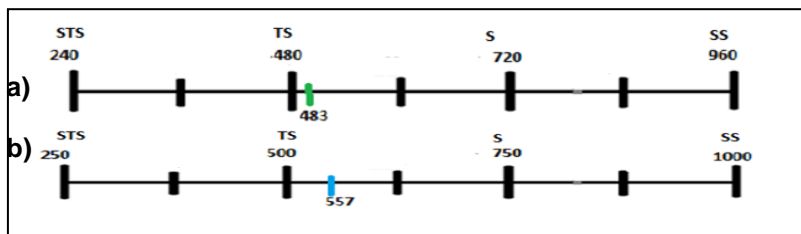
- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Berdasarkan diagram garis kontinum diatas, tingkat persepsi responden (1040) berada di batas skala persepsi setuju (1225) dan skala persepsi tidak setuju (980) dengan kecendrungan berada pada skala tidak setuju. Berdasarkan diagram garis kontinum dalam gambar 4.2, dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat mengetahui dan mengerti apa tindakan yang dimaksud dengan perambahan hutan. Hal ini dibuktikan dengan tidak semua masyarakat yang melakukan tindakan membuka lahan perkebunan, berladang serta memungut hasil hutan secara tidak sah pada kawasan hutan. Masyarakat menganggap hutan merupakan area publik dimana siapapun bisa untuk memasukinya namun tidak untuk dimiliki secara perorangan.

Berdasarkan uraian diatas, Schlager & Ostrom (1992) *cit* Edi Sulistio (2014) membagi pemegang hak atas sumber daya alam menjadi lima strata. Pertama,

outborized entrace merupakan pengguna sumber daya yang hanya memiliki hak memasuki (*access*) suatu kawasan tertentu. Kedua, *autborized user* adalah pengguna sumberdaya yang memiliki hak memasuki (*accsess*) dan memanen unit sumber daya (*withdrawal*). Ketiga, *claimants* adalah pengguna sumber daya yang memiliki tiga hak yaitu hak *access, withdrawal* dan *management*. Keempat, *propriorietors* adalah pengguna sumberdaya yang memiliki hak seperti yang dimiliki oleh *claimants*, ditambah ditambah hak untuk menentukan pihak pihak yang dapat memanen sumber daya. Kelima *owner* adalah pengguna sumber daya yang memiliki hak seperti *proprietors* ditambah hak *alienation*, yaitu hak untuk memindah tangankan. Dalam hal ini masyarakat di kedua desa, yaitu Desa Dara Kunci dan Desa sugian berada pada strata pertama yaitu *outborized entrace* yaitu penggunaan sumber daya yang hanya memiliki hak untuk memasuki (*access*) pada suatu kawasan saja.

Selanjutnya persepsi responden dibagi lagi berdasarkan keterikatan respondent terhadap kawasan hutan yakni responden yang merupakan anggota dari kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan responden yang tidak tergabung dalam kelompok Hutan Kemasyaraktan (HKm). Untuk tingkat persepsi responden terhadap persepsi masyarakat terhadap praktek perambahan hutan, dapat dilihat dalam diagram-diagram garis kontinum berikut ini.



Gambar diagram garis kontinum Persepsi masyarakat terhadap peraktek perambahan hutan keikutsertaan dalam kelompok HKm dan non HKm

Keterangan:

- Gambar a : Responden yang merupakan Anggota HKm
- Gambar b : Responden yang tidak termasuk dalam keanggotaan HKm
- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Berdasarkan diagram garis kontinum diatas, terdapat perbedaan persepsi yang cukup besar antara petani HKm dengan yang tidak tergabung dalam kelompok HKm namun masih berada pada satu batas skala persepsi tidak setuju. Hal ini dikarenakan masyarakat menentang adanya tindakan perambahan yang berakibat rusaknya kawasan hutan, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan dengan memungut hasil hutan seperti kayu yang sudah mati karena tumbang maupun hasil hutan lainnya.

4.5 Ketergantungan dan Interaksi Masyarakat Dengan Kawasan Hutan

Perilaku merupakan proses interaksi antara kepribadian dan lingkungan yang mengandung rangsangan (stimulus), kemudian ditanggapi dalam bentuk respon. Respon inilah yang disebut perilaku. Perilaku ditentukan oleh persepsi dan kepribadian, sedang persepsi dan berpendapat, bersikap dan sebagainya) untuk memberikan respon terhadap situasi di luar subjek tertentu. Respon ini dapat bersifat positif (tanpa tindakan) dan bersifat aktif (dengan tindakan) ((Notoatmodjo,1985) (dalam Boedoyo, 1986)). Hasil

pengolahan data yang dikumpulkan menggunakan kusioner terkait perilaku (aktivitas) masyarakat terkait keberadaan hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

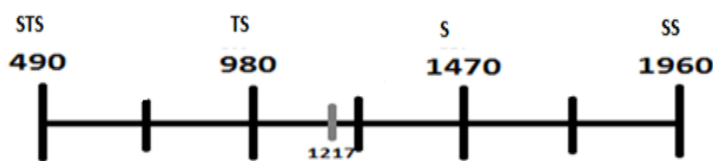
Tabel ketergantungan dan interaksi masyarakat dengan kawasan hutan

| No | Jawaban Respondem | Bobot | Frekuensi | Presentase | Hasil |
|----|---------------------|-------|-----------|------------|-------|
| 1 | Sangat setuju | 4 | 39 | 7,95 | 156 |
| 2 | Setuju | 3 | 179 | 36,5 | 537 |
| 3 | Tidak setuju | 2 | 252 | 51,4 | 504 |
| 4 | Sangat tidak setuju | 1 | 20 | 4,1 | 20 |
| | | | 490 | 100 | 1217 |

Sumber : Data Primer, diolah (2018)

Kategori sangat setuju maksudnya masyarakat memiliki ketergantungan dan interaksi terhadap kawasan hutan yang sangat tinggi. Kategori setuju maksudnya masyarakat memiliki ketergantungan dan interaksi terhadap kawasan hutan yang cukup tinggi. Kategori tidak setuju maksudnya masyarakat memiliki ketergantungan dan interaksi terhadap kawasan hutan yang rendah. Sedangkan kategori sangat tidak setuju maksudnya masyarakat merasa tidak memiliki ketergantungan dan interaksi terhadap kawasan hutan.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai data pada tabel 4.10, maka data dimasukkan kedalam diagram garis kontinum.



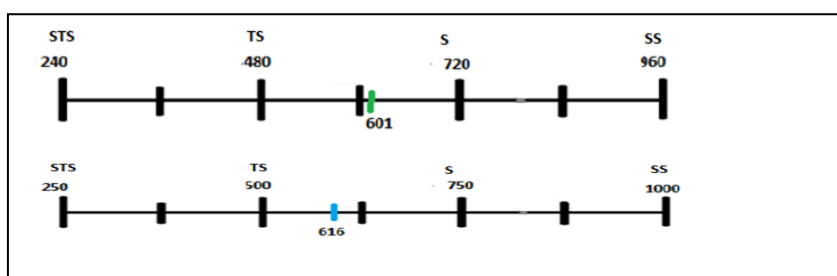
Gambar garis kontinum ketergantungan dan interaksi masyarakat dengan kawasan hutan

Keterangan :

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Berdasarkan diagram garis kontinum diatas, tingkat persepsi responden (1217) berada di antara batas skalasetuju (1225) dan skala tidak setuju (980) dengan kecenderungan berada pada skala tidak setuju. Artinya dari hasil wawancara bahwa responden tidak memiliki kecenderungan untuk tinggal di dalam kawasan hutan, jarak tempuh masyarakat dengan kawasan hutanpun tidak mempengaruhi masyarakat untuk memasuki kawasan hutan setiap saat. Adapun bila masyarakat melakukan kegiatan memungut hasil hutan, biasanya berupa ranting atau kayu yang sudah mati, tanpa merubahnya menjadi lahan perkebunan dan perladangan.

Selanjutnya persepsi responden dibagi lagi berdasarkan keterikatan respondent terhadap kawasan hutan yakni responden yang merupakan anggota dari kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan responden yang tidak tergabung dalam kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm). Untuk tingkat ketergantungan dan interaksi masyarakat dengan kawasan hutan, dapat dilihat dalam diagram-diagram garis kontinum berikut ini.



a)

b)

Gambar diagram garis kontinum *ketergantungan dan interaksi masyarakat dengan kawasan hutandalam* kelompok HKm dan non HKm

Keterangan:

- Gambar a : Responden yang merupakan Anggota HKm
Gambar b : Responden yang tidak termasuk dalam keanggotaan HKm
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

Berdasarkan diagram-diagram garis kontinum diatas, terlihat ada perbedaan persepsi responden baik itu responden yang tergabung dalam kelompok HKm dengan yang tidak tergabung dalam kelompok HKm namun masih berada pada satu batas skala persepsi tidak setuju. Ini dikarenakan masyarakat mengetahui aktifitas apa saja yang dapat mengganggu bahkan merusak keberadaan hutan walaupun ada aktifitas yang bersifat positif namun masyarakat masih belum bisa mengoptimalkan kegiatan tersebut dengan baik.

Adapun beberapa kasus yang erat kaitanya dengan permasalahan diatas adalah (1) Banyak masyarakat yang menganggap pemberian izin HKm sebagai tindakan pembenaran/pelegalan terhadap tindakan berupa penbangan pohon pada lahan garapan dengan dalih sebagai penjarangan antara tanaman kayu dan tanaman MPTs, dan (2) Maraknya lokasi perambahan di luar kawasan areala kerja dengan tujuan untuk memperluas areal HKm. Meskipun di beberapa lokasi HKm menunjukkan hasil yang baik, namun dengan adanya kasus – kasus tersebut, dapat menjadi kontra-produktif bagi implementasi program HKM dimasa yang akan datang (Markum, dkk 2014)

4.6 Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perambahan Hutan

Faktor penyebab kerusakan hutan di Indonesia menurut Sarjono (1998), dan Silviani (2008) adalah faktor ekonomi masyarakat di sekitar hutan yang digambarkan sebagai masyarakat petani miskin. Sarjono, (1998) menyatakan bahwa penyebab tingginya perambahan hutan adalah motivasi petani untuk memiliki lahan di kawasan lindung. Aspek pengamanan hutan yaitu terbatasnya jumlah petugas pengawas kehutanan mendorong Berkembangnya free riders dan pelaku ekonomi melakukan praktek illegal logging sehingga menyebabkan masuknya perambah hutan (Effendi, 2007). Maraknya perambah hutan menurut Andri (2002) disebabkan belum sinkronnya program antar sektor kehutanan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan lindung. Hasil pengolahan data yang dikumpulkan menggunakan kusioner terkait faktor faktor penyebab terjadinya perambahan hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

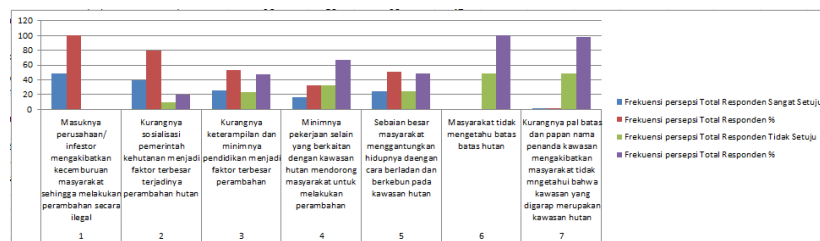
Tabel faktor faktor penyebab terjadinya perambahan hutan

| Faktor faktor terjadinya perambahan hutan | Frekuensi persepsi Total Responden | | | |
|--|------------------------------------|-----|--------------|-----|
| | Sangat Setuju | % | Tidak Setuju | % |
| 1 Masuknya perusahaan/ investor mengakibatkan kecemburuan masyarakat sehingga melakukan perambahan secara ilegal | 49 | 100 | 0 | 0 |
| 2 Kurangnya sosialisasi pemerintah kehutanan menjadi faktor terbesar terjadinya perambahan hutan | 39 | 80 | 10 | 20 |
| 3 Kurangnya keterampilan dan minimnya pendidikan menjadi faktor terbesar perambahan | 26 | 53 | 23 | 47 |
| 4 Minimnya pekerjaan selain yang berkaitan dengan kawasan hutan mendorong masyarakat untuk melakukan perambahan | 16 | 33 | 33 | 67 |
| 5 Sebaian besar masyarakat menggantungkan hidupnya daengan cara berladan dan berkebun pada kawasan hutan | 25 | 51 | 24 | 49 |
| 6 Masyarakat tidak mengetahui batas batas hutan | 0 | 0 | 49 | 100 |
| 7 Kurangnya pal batas dan papan nama penanda kawasan mengakibatkan masyarakat tidak mngetahui bahwa kawasan yang digarap merupakan kawasan hutan | 1 | 2 | 48 | 98 |

Sumber : Data Primer, diolah (2018)

Kategori sangat setuju maksudnya responden maksudnya sangat paham mengenai faktor penyebab terjadinya perambahan hutan dan berupaya untuk tidak melakukan aktifitas tersebut. Kategori sangat tidak setuju maksudnya responden tidak mengetahui dan memahami apa saja penyebab terjadinya perambahan hutan. Untuk gambaran lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grtafik frekuensi persepsi total responden



Sumber : Data Primer, diolah (2018)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa responden sangat paham mengenai apa saja faktor-faktor terjadinya perambahan hutan, mulai dari masuknya investor asing yang bisa memicu terjadinya kecemburuan pada masyarakat sehingga melakukan perambahan secara ilegal yang tidak sesuai dengan undang undang yang diterapkan sampai dengan masih kurangnya sosialisasi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah

yang dapat memicu ketidak tahuan masyarakat sehingga melakukan pembabatan pada kawasan hutan. Adapun perbandingan persepsi masyarakat yang tergabung dalam keanggotaan HKM dan non anggota HKM dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel faktor faktor penyebab terjadinya perambahan hutan menurut Anggota Hutan Kemasyarakatan

| Faktor faktor terjadinya perambahan hutan | Frekuensi persepsi Responden HKM | | | |
|---|----------------------------------|-------|--------------|-----|
| | Sangat setuju | % | Tidak setuju | % |
| 1 Masuknya perusahaan/ investor mengakibatkan kecemburuan masyarakat sehingga melakukan perambahan secara illegal | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 2 Kurangnya sosialisasi pemerintah kehutanan menjadi faktor terbesar terjadinya perambahan hutan | 14 | 58.33 | 10 | 42 |
| 3 Kurangnya keterampilan dan minimnya pendidikan menjadi faktor terbesar perambahan | 8 | 33.33 | 16 | 67 |
| 4 Minimnya pekerjaan selain yang berkaitan dengan kawasan hutan mendorong masyarakat untuk melakukan perambahan | 4 | 17 | 20 | 83 |
| 5 Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya daengan cara berladang dan berkebun pada kawasan hutan | 17 | 71 | 7 | 29 |
| 6 Masyarakat tidak mengetahui batas batas hutan | 0 | 0 | 24 | 100 |
| 7 Kurangnya pal batas dan papan nama penanda kawasan mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui bahwa kawasan yang digarap merupakan kawasan hutan | 0 | 0 | 24 | 100 |

Sumber : Data Primer, diolah (2018)

Dari hasil pengolahan data pada responden yang tergabung dalam keanggotaan HKM diketahui bahwa masuknya investor dapat mengakibatkan terjadinya kecemburuan pada masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa dianak tirikan oleh pemerintah dikarenakan izin pemanfaatan hutan yang diberikan oleh pemerintah kepada investor lebih diutamakan daripada masyarakat sekitar kawasan hutan. Kurangnya sosialisai dan langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan ketidaktahuan oleh masyarakat juga mengakibatkan terjadinya perambahan. Hal ini juga bisa disebabkan oleh masih minimnya pendidikan masyarakat pada sekitar kawasan tersebut. Yang terakhir, sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan hutan mnggantungkan kehidupannya pada hutan namun hasil yang ditawarkan oleh hutan hanya jangka panjang saja bukan yang bisa dirasakan secara langsung. Sedangkan hasil pengolahan data responden yang bukan termasuk dalam keanggotaan HKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Faktor faktor penyebab terjadinya perambahan hutan menurut masyarakat non anggota Hutan Kemasyarakatan

| Faktor faktor terjadinya perambahan hutan | Frekuensi persepsi Responden Non HKM | | | |
|--|--------------------------------------|-----|--------------|-----|
| | Sangat setuju | % | Tidak setuju | % |
| 1 Masuknya perusahaan/ investor mengakibatkan kecemburuan masyarakat sehingga melakukan perambahan secara illegal | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 Kurangnya sosialisasi pemerintah kehutanan menjadi faktor terbesar terjadinya perambahan hutan | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 3 Kurangnya keterampilan dan minimnya pendidikan menjadi faktor terbesar perambahan | 18 | 72 | 7 | 28 |
| 4 Minimnya pekerjaan selain yang berkaitan dengan kawasan hutan mendorong masyarakat untuk melakukan perambahan | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 5 Sebaian besar masyarakat menggantungkan hidupnya daengan cara berladan dan berkebun pada kawasan hutan | 8 | 32 | 17 | 68 |
| 6 Masyarakat tidak mengetahui batas batas hutan | 0 | 0 | 25 | 100 |
| 7 Kurangnya pal batas dan papan nama penanda kawasan mengakibatkan masyarakat tidak mngetahui bahwa kawasan yang digarap merupakan kawasan hutan | 1 | 4 | 24 | 96 |

Sumber : Data Primer, diolah (2018)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok hutan kemasyarakatan diperoleh hasil yang tidak begitu jauh berbeda dengan masyarakat yang bergabung dengan hutan kemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari kecemburuan masyarakat yang begitu besar apabila ada investor yang lebih diutamakan dibanding masyarakat sekitar. Selain itu masih kurangnya perhatian pemerintah dilihat dari kurangnya sosialisasi yang merupakan salah satu kendala terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini. Serta masih kurangnya keterampilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya lah yang mengakibatkan terjadinya perambahan. Hal ini disebabkan pula oleh rendahnya pendidikan masyarakat, yang apabila kita telusuri sebagian besar masyarakat pada daerah tersebut hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar atau sampai dengan sekolah menengah pertama saja.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi masyarakat tentang kawasan hutan di KPHL Rinjani Timur adalah:
 - a. Masyarakat pada sekitar kawasan hutan mengetahui fungsi hutan baik itu fungsi konservasi maupun fungsi lindung, namun masyarakat masih belum dapat menikmati fungsi dari keberadaan hutan tersebut secara langsung dan optimal. Hal ini dikarenakan hutan saat ini hanya memberikan keuntungan jangka panjang seperti sebagai resapan air, ketersediaan kualitas air dan mencegah bencana alam seperti banjir.

- b. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara masyarakat yang tergabung dalam petani HKm dan non HKm namun masih dalam batas skala tidak setuju akan tindakan perambahan hutan. Masyarakat pada sekitar kawasan hutan sadar mengenai tindakan perambahan hutan dimana masyarakat pada saat ini berada pada strata *authorized entrance* dimana masyarakat hanya memiliki hak *access* saja pada kawasan hutan tersebut tanpa memiliki hak atas tanah.
 - c. Masyarakat pada kawasan hutan memiliki interaksi dan ketergantungan pada hutan, namun hal tersebut tidak mendorong masyarakat untuk mengkonversi kawasan hutan sebagai lahan perkebunan dan pertanian.
2. Masuknya investor/ perusahaan berdampak pada kecemburuan dari masyarakat sekitar kawasan hutan sehingga mendorong terjadinya perambahan hutan. Selain itu minimnya keterampilan masyarakat, tingkat pendidikan yang masih rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah serta sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan menjadi faktor utama kenapa perambahan masih terjadi pada kawasan hutan tersebut.

Saran

Berdasarkan permasalahan diatas maka saran yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah.

1. Kepada pemerintah diharkan rutin melakukan sosialisasi tentang kehutanan, agar masyarakat lebih mengerti manfaat ekonomi dan ekologi hutan, khususnya di Desa Dara Kunci dan Desa Sugian dikarenakan sering terjadi bencana alam banjir bandang setiap musim hujan akibat dari berkurangnya pohon pada kawasan hutan di sekitar Desa Dara Kunci dan Desa Sugian.
2. Kepada masyarakat Desa Dara Kunci dan Desa Sugian di harapkan agar lebih memperhatikan kembali kawasan hutan dengan penanaman kembali hutan yang sudah gundul.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius . Yogyakarta CIFOR Bogor
- Boedjo. 1986. Arsitektur, Manusia, dan Pengamatannya . Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Damiati, V. 2014 Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Kawasan Hutan Gunung Baduk Sebagai Sumber Air Bersih di Desa Idas Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau. [Skripsi]. Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak.
- Djajono A., 2009. Persoalan Sosial Ekonomi Seputar Kawasan Hutan "Prambahan Kawasan". Artikel, 28 Februari 2018 18:30
- Hadi, Sutrisno. 2002. **Metodologi Research**. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Haryono., 2007, *Banjir dan Aliran debris*, Materi kuliah Program Sarjana Magister pengelolaan Bencana Alam, Fakultas Teknik dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- Lamb, D. 1994. Reforestation of Degraded Tropical Forest Lands in the Asia-Pacific Region. *Journal of Tropical Forest Science* 7(1):1-7
- Nawir, A.A., Muniarti dan Lukas Rumboko. 2008. **Rehabilitasi Hutan di Indonesia**.
- Nazir, Moh. (2009). **Metode Penelitian**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Notoatmodjo, S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : Rineka Cipta 2007
- Rakhmat, J. (2005). **Metode Penelitian Komunikasi**. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Senoaji G. 2010. Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Lindung Konak Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu. Jurnal Kehutanan. Universitas Bengkulu.
- Singarimbun, Masri. 1995. **Metode Penelitian Survey**. Jakarta: LP3ES
- Sugiono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung. Alfabeta
- Zain, S. A. 1998 . **Kamus Kehutanan** . Rineke Cipta , Jakarta.
- Schlager, Edella and Elinor Ostrom. 1992. Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. Land Economics. August 1992. Vol 68 (3): 249-262.
- Sardjono, M.A. 1998. Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan di Kaltim.
- Sylviani, 2008. Kajian dampak perubahan fungsi kawasan hutan terhadap masyarakat sekitar. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 5 No. 3 September 2008.
- <https://alamendah.org/2010/03/09/kerusakan-hutan-deforestasi-di-indonesia/>
- <http://karyatulisilmiah.com/pengertian-deforestasi-dan-degradasi-hutan/>
- <http://kph.menlhk.go.id/profil-kphl-model-lombok-timur-provinsi-ntb&catid=105:nusa-tenggara-barat&Itemid=330>
- <http://dpu.ntbprov.go.id/web/post/Banjir-Di-Kabupaten-& cd = 1 & hl = id & ct = cInk & gl = id>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31467/Reference.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- <http://kantordesadarakunci.blogspot.co.id/2017/12/profil-desa-dara-kunci.html>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/55835/Reference.pdf?sequence=2>